

Analisis Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Laporan Keuangan BUMDes Kusuma Desa Ampeldento

Amanda Junivia Adisty^{1*}, Dwiyani Sudaryanti², Naimatul Hasanah³

^{1,2,3} Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Malang

*Email Korespondensi: amndajuniv95@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip akuntansi dan transparansi dalam pengelolaan laporan keuangan BUMDes Kusuma Desa Ampeldento serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip tata kelola keuangan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif analitis dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi yang kemudian dianalisis menggunakan analisis tematik dengan triangulasi sumber, teknik, dan waktu sebagai uji keabsahan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BUMDes Kusuma telah menerapkan prinsip akuntabilitas melalui pencatatan transaksi, penyusunan laporan keuangan, dan penyampaian pertanggungjawaban kepada pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Transparansi dilakukan melalui penyampaian informasi kepada perangkat desa dan forum internal desa. Namun, implementasi akuntabilitas dan transparansi belum berjalan optimal karena laporan keuangan belum sepenuhnya sesuai dengan SAK EMKM, sistem administrasi masih sederhana, serta akses informasi kepada masyarakat masih terbatas. Faktor penghambat utama meliputi keterbatasan sumber daya manusia dan belum adanya sistem administrasi yang terstruktur. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan SDM, penguatan sistem administrasi, dan penerapan laporan keuangan berbasis standar akuntansi agar pengelolaan keuangan BUMDes lebih efektif, transparan, dan akuntabel.

Kata Kunci: Akuntabilitas, transparansi, pengelolaan laporan keuangan, BUMDes.

ABSTRACT

This study aims to analyze the application of the principles of accountability and transparency in the management of the financial reports of BUMDes Kusuma in Ampeldento Village and to assess their compliance with applicable financial government principles. The study employs a qualitative-analytical method using a case study approach. Data collection was conducted through interviews, observations, and documentation, which were then analyzed using thematic analysis with triangulation of sources, techniques, and time to validate the data. The results indicate that BUMDes Kusuma has implemented accountability principles through transaction recording, the preparation of financial statements, and the submission of accountability reports to the village government and the Village Consultative Body (BPD). Transparency is achieved through the dissemination of information to village officials and internal village forums. However, the implementation of accountability and transparency has not been optimal because financial reports are not yet fully compliant with SAK EMKM, the administrative system remains rudimentary, and public access to information is still limited. The main constraints include limited human resources and the absence of a structured administrative system. Therefore, it is necessary to improve human resources, strengthen the administrative system, and implement financial reporting based on accounting standards so that BUMDes financial management is more effective, transparent, and accountable.

Keywords: Accountability, transparency, financial reporting management, BUMDes.

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi desa menjadi bagian penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara merata dan berkelanjutan. Selain berfungsi sebagai wilayah administratif,

desa juga merupakan pusat aktivitas ekonomi masyarakat yang memiliki kemampuan dalam memanfaatkan sumber daya lokal. Melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah memberikan kewenangan kepada desa untuk mengatur dan mengelola kepentingan sendiri berdasarkan hak asal usul dan potensi lokal yang dimiliki. Salah satu bentuk penerapan kebijakan tersebut diwujudkan melalui pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai lembaga ekonomi desa yang berperan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes), menciptakan peluang kerja, dan mendukung kesejahteraan masyarakat desa. Kehadiran BUMDes diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi desa melalui pengelolaan usaha yang profesional dan keberlanjutan.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 menegaskan bahwa pengelolaan BUMDes harus dilakukan secara profesional, terbuka, partisipatif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh sebab itu, penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi diperlukan dalam pengelolaan laporan keuangan BUMDes. Akuntabilitas diperlukan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelola terhadap penggunaan sumber daya dan pelaksanaan kegiatan usaha, sedangkan transparansi diperlukan agar masyarakat dapat memperoleh akses informasi terkait pengelolaan keuangan BUMDes. Penerapan kedua prinsip tersebut menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola BUMDes yang baik serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap organisasi desa.

Berdasarkan data Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, hingga pertengahan tahun 2024 tercatat sebanyak 65.941 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang tersebar di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, sebanyak 18.805 BUMDes telah berbadan hukum dan aktif berkontribusi dalam pengembangan ekonomi desa serta peningkatan kesejahteraan masyarakat (ANTARA News Kaltara, 2024). Namun demikian, peningkatan jumlah BUMDes belum sepenuhnya diikuti dengan kualitas tata kelola keuangan yang baik. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan laporan keuangan pada BUMDes masih menghadapi berbagai hambatan, seperti keterbatasan kompetensi sumber daya manusia, sistem administrasi yang belum optimal, serta rendahnya transparansi informasi kepada masyarakat. Iswoyo et al. (2023) menyatakan bahwa rendahnya kompetensi pengelolaan dalam bidang akuntansi menjadi salah satu penyebab lemahnya akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan BUMDes. Safarudin (2024) juga menjelaskan bahwa keterbatasan kapasitas aparat desa dan belum jelasnya pemisahan fungsi administrasi pemerintahan dengan pengelolaan usaha menyebabkan pengelolaan keuangan BUMDes belum berjalan optimal.

Selain akuntabilitas, transparansi juga menjadi persoalan penting dalam pengelolaan BUMDes. Apriliani et al. (2021) menyatakan bahwa transparansi pelaporan BUMDes masih tergolong rendah karena minimnya publikasi laporan keuangan dan rendahnya pemahaman aparat desa mengenai pentingnya keterbukaan informasi publik. Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat kesulitan memperoleh informasi mengenai pengelolaan dana dan perkembangan usaha BUMDes. Sulistiyowati et al., (2021) juga menegaskan bahwa implementasi SAK EMKM pada entitas mikro, kecil, dan menengah masih belum optimal. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh keterbatasan pemahaman teknis pengelolaan serta minimnya pelatihan akuntansi. Akibatnya, penyajian laporan keuangan belum sepenuhnya memenuhi prinsip akuntabilitas dan transparansi sesuai standar yang ada.

Fenomena tersebut juga ditemukan pada BUMDes Kusuma Desa Ampeldento, Kabupaten Malang. Berdasarkan hasil observasi awal, BUMDes Kusuma merupakan BUMDes yang aktif menjalankan beberapa unit usaha dan memiliki dokumen transaksi yang cukup lengkap. Pengelola juga telah melakukan pencatatan transaksi dan menyusun laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pemerintah desa. Namun demikian, sistem administrasi dan penyampaian dokumen masih belum tertata dengan baik karena belum tersedia ruang administrasi khusus sebagai pusat penyimpanan arsip. Selain itu, laporan

keuangan hanya disampaikan kepada pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sehingga masyarakat belum memperoleh akses informasi secara langsung mengenai kondisi keuangan dan perkembangan usaha BUMDes. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerapan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan laporan keuangan BUMDes Kusuma masih memerlukan evaluasi lebih lanjut.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah mengkaji akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan BUMDes. Akbar et al. (2023) menemukan bahwa BUMDes Bina Sejahtera telah menerapkan akuntabilitas dan transparansi dengan cukup baik meskipun masih terdapat kendala keahlian sumber daya manusia dalam penyusunan laporan keuangan. Rahmawati et al. (2023) menunjukkan bahwa transparansi pengelolaan keuangan BUMDes belum berjalan optimal karena informasi keuangan belum sepenuhnya dapat diakses oleh masyarakat. Sementara itu, Ana & Ga (2021) menemukan bahwa laporan keuangan BUMDes belum memenuhi standar akuntansi dan keterbukaan informasi publik masih rendah. Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas dan transparansi BUMDes masih bervariasi dan dipengaruhi oleh kemampuan administrasi, pemahaman standar pelaporan, dan mekanisme penyampaian informasi kepada masyarakat.

Namun demikian, penelitian terdahulu masih memiliki beberapa keterbatasan. Sebagian besar penelitian sebelumnya hanya berfokus pada gambaran umum penerapan akuntabilitas dan transparansi tanpa melakukan analisis mendalam terhadap kesesuaian laporan keuangan dengan prinsip-prinsip laporan keuangan seperti relevansi, keterbandingan, keterpahaman, dan ketepatan waktu. Selain itu, penelitian sebelumnya juga banyak mengkaji keterkaitan penerapan akuntabilitas dan transparansi dengan teori legitimasi dan teori stakeholder dalam pengelolaan laporan keuangan BUMDes. Penelitian mengenai pengelolaan laporan keuangan pada BUMDes Kusuma Desa Ampeldento juga masih sangat terbatas dan lebih banyak membahas aspek pemberdayaan ekonomi desa dibanding tata kelola keuangan. Dengan demikian, terdapat *research gap* berupa belum adanya penelitian yang menganalisis penerapan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan laporan keuangan BUMDes secara mendalam berdasarkan teori legitimasi, teori stakeholder, serta kesesuaiannya dengan SAK EMKM dan prinsip laporan keuangan.

berdasarkan *research gap* tersebut, penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) pada analisis penerapan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan laporan keuangan BUMDes yang dikaji tidak hanya dari sisi administratif, tetapi juga berdasarkan kesesuaian dengan prinsip laporan keuangan, SAK EMKM, serta perspektif teori legitimasi dan teori stakeholder. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kualitas tata kelola keuangan BUMDes serta menjadi bahan evaluasi dalam penguatan tata kelola BUMDes di tingkat desa.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Legitimasi

Teori legitimasi menjelaskan bahwa keberlangsungan organisasi dipengaruhi oleh penerimaan masyarakat terhadap aktivitas organisasi tersebut. Suchman (1995) menyatakan bahwa legitimasi merupakan persepsi masyarakat bahwa tindakan organisasi telah sesuai dengan norma, nilai dan harapan sosial yang berlaku. Organisasi yang mampu memenuhi harapan masyarakat akan memperoleh dukungan dan kepercayaan publik. Dalam konteks BUMDes, legitimasi dapat diperoleh melalui pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel sehingga masyarakat memberikan kepercayaan terhadap pengelolaan BUMDes (Suchman, 1995). Semakin baik keterbukaan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan, maka semakin tinggi tingkat legitimasi organisasi di mata masyarakat.

Teori Stakeholder

Teori stakeholder menekankan bahwa organisasi memiliki tanggung jawab kepada seluruh pihak yang berkepentingan, termasuk masyarakat, pemerintah desa, dan pengelola organisasi. Donaldson & Preston (1995) menjelaskan bahwa organisasi harus mampu memenuhi kebutuhan informasi stakeholder melalui pengelolaan yang transparansi dan akuntabel. Dalam penelitian ini, stakeholder utama BUMDes meliputi pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), masyarakat desa, dan pengelola BUMDes. Oleh karena itu, pengelolaan laporan keuangan yang baik diperlukan agar kebutuhan informasi stakeholder dapat terpenuhi serta tercipta hubungan yang harmonis antara organisasi dengan masyarakat (Donaldson & Preston, 1995).

Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kewajiban suatu organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan. Mardiasmo (2021) menyatakan bahwa akuntabilitas dalam sektor publik menuntut adanya pelaporan yang terbuka, dapat diverifikasi, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam pengelolaan BUMDes akuntabilitas dapat dilihat melalui pencatatan transaksi, penyusunan laporan keuangan, penyampaian laporan pertanggungjawaban, dan adanya pengawasan terhadap pengelolaan keuangan. Akuntabilitas yang baik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan BUMDes (Mardiasmo, 2021).

Transparansi

Transparansi merupakan keterbukaan organisasi dalam menyampaikan informasi kepada pihak yang berkepentingan. Transparansi penting untuk meningkatkan pengawasan masyarakat, membangun kepercayaan publik, serta menciptakan tata kelola organisasi yang baik (Mardiasmo, 2021). Dalam konteks BUMDes, transparansi diwujudkan melalui keterbukaan informasi pengelolaan keuangan dan penyampaian laporan keuangan kepada masyarakat maupun pemerintah desa. Transparansi juga menjadi sarana untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan BUMDes (Mardiasmo 2021).

KERANGKA BERFIKIR

Fenomena: Pengelolaan dan pelaporan keuangan BUMDes Kusuma belum sepenuhnya menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi.



Konsep/Teori:

1. Akuntabilitas (Kontrol internal, Pencatatan transaksi, Pertanggungjawaban keuangan, Pengawasan)
2. Transparansi (Keterbukaan informasi, Publikasi laporan, Aksesibilitas informasi)
3. Legitimasi (Kepercayaan masyarakat, Penerimaan sosial, Citra organisasi)
4. Stakeholder (Partisipasi masyarakat, Pengawasan stakeholder, Kebutuhan informasi)



Kesenjangan: Penelitian sebelumnya cenderung bersifat deskriptif dan belum menganalisis secara mendalam akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan laporan keuangan BUMDes.



Fokus Penelitian:

1. Implementasi akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan BUMDes Kusuma.
2. Penerapan transparansi dalam penyampaian dan keterbukaan laporan keuangan BUMDes Kusuma.
3. Kesesuaian laporan keuangan BUMDes Kusuma dengan prinsip tata kelola keuangan dan standar akuntansi (SAK EMKM).
4. Faktor pendukung dan penghambat pengelolaan keuangan BUMDes.

Keterangan:

Penelitian ini berangkat dari fenomena bahwa pengelolaan dan pelaporan keuangan BUMDes Kusuma belum sepenuhnya merupakan prinsip akuntabilitas dan transparansi secara optimal. Untuk menganalisis permasalahan tersebut, penelitian menggunakan konsep akuntabilitas, transparansi, teori legitimasi, dan teori stakeholder. Konsep akuntabilitas digunakan untuk menganalisis proses pencatatan transaksi, pertanggungjawaban keuangan, serta pengawasan dalam pengelolaan laporan keuangan BUMDes. Konsep transparansi digunakan untuk melihat keterbukaan informasi, publikasi laporan, dan aksesibilitas informasi kepada masyarakat. Sementara itu, teori legitimasi digunakan untuk memahami bagaimana BUMDes memperoleh kepercayaan masyarakat melalui pengelolaan keuangan yang baik. Teori stakeholder digunakan untuk menganalisis hubungan BUMDes dengan pihak-pihak yang berkepentingan, seperti pemerintah desa, masyarakat, dan pengelolaan BUMDes. Penelitian ini difokuskan pada implementasi akuntabilitas, penerapan transparansi, kesesuaian laporan keuangan dengan prinsip tata kelola keuangan dan SAK EMKM, serta faktor pendukung dan penghambat pengelolaan keuangan BUMDes Kusuma.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif analitis dengan pendekatan studi kasus. Metode kualitatif digunakan untuk memahami fenomena secara mendalam sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan serta menekankan proses interpretasi terhadap data yang diperoleh dari informan penelitian (Sugiyono, 2023). Pendekatan studi kasus dipilih karena penelitian difokuskan pada analisis penerapan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan laporan keuangan BUMDes Kusuma Desa Ampeldento secara mendalam dan kontekstual. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memahami praktik pengelolaan keuangan, mekanisme pelaporan, serta berbagai kendala yang dihadapi pengelola BUMDes dalam menerapkan prinsip tata kelola keuangan yang baik.

Penelitian dilaksanakan di BUMDes Kusuma Desa Ampeldento, Kabupaten Malang. Pemilihan lokasi dilakukan secara purposive dengan mempertimbangkan bahwa BUMDes Kusuma merupakan BUMDes yang aktif menjalankan kegiatan usaha dan memiliki aktivitas pengelolaan keuangan yang relevan dengan fokus penelitian. Selain itu, berdasarkan observasi awal ditemukan bahwa sistem administrasi dan penyimpanan dokumen keuangan masih belum tertata secara optimal sehingga menarik untuk dianalisis lebih lanjut dari aspek akuntabilitas dan transparansi. Penelitian dilaksanakan pada periode November 2025 hingga Maret 2026.

Subjek penelitian ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan berdasarkan keterlibatan, pengalaman, atau pertimbangan tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian, serta pemahaman terhadap pengelolaan laporan keuangan BUMDes (Sugiyono, 2023). Informan penelitian terdiri dari Direktur, sekretaris, bendahara, pengawas BUMDes, Kepala Desa, Sekretaris Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pengelola unit usaha BUMDes, dan masyarakat desa. Pemilihan informasi tersebut bertujuan untuk memperoleh informasi yang komprehensif mengenai proses pencatatan transaksi, penyusunan laporan keuangan, mekanisme pertanggungjawaban, serta keterbukaan informasi kepada masyarakat.

Sumber data dalam penelitian ini mencakup data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara serta observasi langsung terhadap kegiatan pengelolaan keuangan BUMDes. Adapun, data sekunder diperoleh dari dokumentasi berupa laporan keuangan, buku kas, nota, kwitansi, serta berbagai dokumen administrasi lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan BUMDes Kusuma periode 2024-2025. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi, dan dokumentasi. Wawancara bertujuan untuk menggali informasi terkait penerapan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan laporan keuangan, sedangkan observasi dilakukan dengan

mengamati secara langsung proses administrasi dan pelaporan keuangan BUMDes. Sementara itu, dokumentasi digunakan untuk memverifikasi data hasil wawancara dan observasi melalui berbagai dokumen pendukung yang tersedia (Creswell & Poth, 2016).

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara sistematis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teknik analisis tematik digunakan untuk menemukan tema-tema utama yang berkaitan dengan praktik akuntabilitas, transparansi, serta kualitas laporan keuangan BUMDes Kusuma (Braun & Clarke, 2006). pada tahap reduksi data, dilakukan pemilihan dan pemfokusan data yang sesuai dengan tujuan penelitian. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk deskripsi naratif agar peneliti dapat lebih mudah memahami keterkaitan antara hasil temuan. Tahap penarikan kesimpulan dilakukan secara bertahap berdasarkan pola serta hubungan antar data yang diperoleh selama proses penelitian (Sugiyono, 2023).

Keabsahan data dalam penelitian ini diuji melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan, seperti pengelola BUMDes, pemerintah desa, BPD, pengelola unit BUMDes, serta masyarakat desa. Triangulasi teknik dilakukan dengan mencocokkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi guna memastikan konsistensi data penelitian. Sementara itu, triangulasi waktu dilakukan dengan mengumpulkan data pada waktu yang berbeda untuk memastikan kestabilan serta kesesuaian informasi yang diperoleh dari para informan (Sugiyono, 2023).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan pada BUMDes Kusuma Desa Ampeldento, diketahui bahwa pengelolaan laporan keuangan telah dilaksanakan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan kepada pemerintah desa dan masyarakat. Pengelolaan tersebut mencakup pencatatan transaksi, penyusunan laporan keuangan, penyampaian laporan pertanggungjawaban, serta pengawasan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Setiap transaksi keuangan telah dilengkapi dengan bukti pendukung seperti nota dan kwitansi sebagai bentuk administrasi keuangan. Pengurus BUMDes juga telah menyusun laporan keuangan sederhana yang disampaikan secara berkala kepada pemerintah desa. Namun demikian, laporan keuangan yang disusun masih bersifat sederhana dan belum sepenuhnya mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan laporan keuangan BUMDes Kusuma masih memerlukan pengembangan agar dapat menghasilkan laporan yang lebih sistematis, terstruktur, dan sesuai dengan standar pelaporan keuangan yang berlaku.

Penerapan akuntabilitas dalam pengelolaan laporan keuangan BUMDes Kusuma terlihat dari adanya pencatatan transaksi, penyusunan laporan pertanggungjawaban, dan pengawasan dari pemerintah desa serta BPD. Setiap pemasukan dan pengeluaran dicatat oleh pengelola dan disertai bukti transaksi sebagai bentuk pertanggungjawaban administratif. Pengawasan terhadap pengelolaan keuangan juga dilakukan melalui evaluasi laporan pertanggungjawaban yang disampaikan pengurus BUMDes kepada pemerintah desa dan BPD secara berkala. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengelola BUMDes telah berupaya untuk menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Menurut Mardiasmo (2021), akuntabilitas sektor publik tidak hanya berkaitan dengan penyampaian laporan pertanggungjawaban, tetapi juga mencakup keterbukaan informasi, kepatuhan terhadap regulasi, dan kemampuan organisasi menghasilkan laporan yang reliabel serta dapat diverifikasi. Akan tetapi, akuntabilitas yang diterapkan pada BUMDes Kusuma masih bersifat administratif dan belum sepenuhnya memenuhi prinsip akuntabilitas substantif karena belum adanya sistem pengendalian internal yang terstruktur serta belum diterapkannya standar

akuntansi secara konsisten. Selain itu, proses pencatatan transaksi masih dilakukan secara sederhana sehingga berpotensi menimbulkan kesalahan pencatatan maupun keterlambatan penyusunan laporan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kualitas pengelolaan laporan keuangan BUMDes Kusuma masih perlu ditingkatkan agar pengelolaan keuangan dapat berlangsung lebih efektif, profesional, serta sesuai dengan prinsip tata kelola keuangan yang baik.

Dari aspek transparansi, BUMDes Kusuma telah melakukan penyampaian informasi terkait perkembangan usaha dan kondisi keuangan kepada pemerintah desa dan forum internal desa melalui musyawarah desa. Penyampaian informasi tersebut dilakukan sebagai bentuk keterbukaan pengurus terhadap pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam pengelolaan BUMDes. Akan tetapi, transparansi kepada masyarakat secara luas masih belum optimal karena laporan keuangan belum dipublikasikan secara terbuka melalui papan informasi desa maupun media publikasi lainnya. Akibatnya, masyarakat belum memperoleh informasi secara umum melalui forum musyawarah desa. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keterbukaan informasi publik masih terbatas sehingga partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BUMDes belum berjalan secara maksimal. Menurut Mardiasmo (2021), transparansi merupakan keterbukaan organisasi dalam menyediakan informasi yang relevan dan mudah diakses bagi pihak yang berkepentingan sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik serta mendukung terwujudnya tata kelola organisasi yang baik. Oleh karena itu, keterbukaan informasi kepada masyarakat menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan BUMDes agar masyarakat dapat mengetahui perkembangan dan kondisi keuangan BUMDes secara lebih jelas.

Dalam perspektif teori legitimasi, keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan merupakan upaya organisasi untuk memperoleh kepercayaan dan penerimaan sosial dari masyarakat. Suchman (1995) menjelaskan bahwa legitimasi organisasi dapat diperoleh apabila aktivitas organisasi sesuai dengan norma dan harapan masyarakat. Kepercayaan masyarakat terhadap BUMDes Kusuma terlihat dari dukungan masyarakat terhadap keberlangsungan usaha BUMDes dan keterlibatan masyarakat dalam forum musyawarah desa. Namun demikian, keterbatasan akses informasi keuangan dapat mempengaruhi tingkat legitimasi organisasi di mata masyarakat karena transparansi publik belum berjalan secara optimal. Selain itu, berdasarkan teori stakeholder, BUMDes memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan informasi seluruh pihak yang berkepentingan, termasuk pemerintah desa, BPD, masyarakat dan pengelola BUMDes, Donaldson & Preston (1995) menjelaskan bahwa organisasi harus mampu menjaga hubungan yang baik dengan stakeholder melalui keterbukaan informasi dan pengelolaan yang akuntabel. Akan tetapi, kebutuhan informasi masyarakat sebagai stakeholder utama belum sepenuhnya terpenuhi karena laporan keuangan belum dipublikasikan secara terbuka dan masyarakat hanya memperoleh informasi secara umum melalui forum musyawarah desa. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keterbukaan informasi kepada stakeholder masih perlu ditingkatkan agar partisipasi dan pengawasan masyarakat terhadap pengelolaan BUMDes dapat berjalan lebih optimal.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pengelolaan laporan keuangan BUMDes Kusuma belum sepenuhnya sesuai dengan SAK EMKM dan prinsip tata kelola keuangan yang baik. Laporan yang disusun masih berbentuk pencatatan sederhana dan belum mencakup catatan atas laporan keuangan. Selain itu, mekanisme publikasi laporan kepada masyarakat juga belum berjalan optimal sebagaimana prinsip transparansi yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021. faktor pendukung penerapan akuntabilitas dan transparansi meliputi adanya dukungan pemerintah desa, komitmen pengurus, serta tersedianya dokumen transaksi yang cukup lengkap. Sementara itu, faktor penghambat utama meliputi keterbatasan sumber daya manusia dalam memahami standar akuntansi, belum adanya

administrasi yang terstruktur, serta keterbatasan media publikasi informasi karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan akuntansi dan tata kelola keuangan, penguatan sistem administrasi, serta penerapan laporan keuangan berbasis standar akuntansi agar pengelolaan keuangan BUMDes dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan akuntabel.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, BUMDes Kusuma Desa Ampeldento telah menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan laporan keuangan melalui pencatatan transaksi, penyusunan laporan pertanggungjawaban, serta penyampaian informasi kepada pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Setiap transaksi telah dilengkapi dengan bukti pendukung sebagai bentuk pertanggungjawaban administratif. Namun, penerapan akuntabilitas dan transparansi belum berjalan optimal karena laporan keuangan masih disusun secara sederhana dan belum sepenuhnya sesuai dengan SAK EMKM, sistem administrasi belum tertata dengan baik, serta akses informasi kepada masyarakat masih terbatas. Dalam perspektif teori legitimasi dan stakeholder, keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan masyarakat dan memenuhi kebutuhan informasi pihak yang berkepentingan. Faktor penghambat utama meliputi keterbatasan sumber daya manusia, belum adanya sistem administrasi yang terstruktur, dan keterbatasan media publikasi informasi. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya dilakukan pada satu objek penelitian dan menggunakan pendekatan kualitatif sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan secara luas. Selain itu, data penelitian hanya berfokus pada laporan keuangan periode 2024-2025 sehingga belum dapat menggambarkan kondisi pengelolaan keuangan BUMDes dalam jangka waktu yang lebih panjang. Oleh karena itu, BUMDes Kusuma disarankan untuk meningkatkan kapasitas pengelola melalui pelatihan akuntansi dan tata kelola keuangan, menerapkan laporan keuangan berbasis SAK EMKM, memperkuat sistem administrasi, serta meningkatkan transparansi melalui publikasi laporan keuangan secara terbuka kepada masyarakat. Selain itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat dilakukan pada lebih banyak BUMDes dengan periode penelitian yang lebih panjang dan pendekatan yang lebih luas agar diperoleh hasil yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, A. M., Sasanti, E. E., Suryantara, A. B., & Hendri, R. S. (2022). Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Bumdes Bina Sejahtera Kembang Kerang, Kabupaten Lombok Timur. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 2(4), 716-725. <https://doi.org/10.29303/risma.v2i4.310>
- Ana, A. T. R., & Ga, L. L. (2021). Analisis akuntabilitas dan transparansi pelaporan keuangan Bumdes (Studi kasus BUMDes INA HUK). *Jurnal Akuntansi: Transparansi Dan Akuntabilitas*, 9(1), 62-72. <https://doi.org/10.35508/jak.v9i1.3991>
- Apriliani, R., Nurhayati, N., & Purnama, D. (2021). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Kuningan. *Tirtayasa Ekonomika*, 16(2), 172-189. <https://dx.doi.org/10.35448/jte.v16i2.10583>
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2016). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches*. Sage publications.
- Donaldson, T., & Preston, L. E. (1995). The stakeholder theory of the corporation: Concepts, evidence, and implications. *Academy of Management Review*, 20(1), 65–91. <https://doi.org/10.5465/amr.1995.9503271992>

- Mardiasmo, M. B. A. (2021). *Akuntansi sektor publik-edisi terbaru*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Iswoyo, A., Aminatuzzuhro, A., & Fauzuddin, Y. (2023). Laporan keuangan BUM Desa: kendala, akuntabilitas, transparansi, dan keberlanjutan. *INOVASI: Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Manajemen*, 19(2), 415-425.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. (2024, 22 Juni). Mendes PDDT: 18.850 BUMDes telah berbadan hukum. *ANTARA News Kaltara*. Retrieved from <https://kaltara.antaranews.com/berita/508539/mendes-pddt-18850-bumdes-telah-berbadan-hukum>
- Rahmawati, R., Nia, M., & Hasniah, H. (2023). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa Sinaulu Jaya. *Jurnal Online Program Studi Pendidikan Ekonomi*, 8(2), 296-306. <https://doi.org/10.36709/jopspe.v8i2.82>
- Republik Indonesia. (2021). Peraturan pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21.
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7
- Safarudin, A. (2024). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Bumdes. *EKALAYA: Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 2(1), 73-81. <https://doi.org/10.59966/ekalaya.v2i1.799>
- Suchman, M. C. (1995). Managing legitimacy: Strategic and institutional approaches. *Academy of Management Review*, 20(3), 571-610. <https://doi.org/10.5465/amr.1995.9508080331>
- Sugiyono. (2023). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sulistiyowati, I., Yusuf, A. A., & Purnama, D. (2021). Efektifitas Penggunaan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM) pada Usaha Menengah. *Review of Applied Accounting Research (RAAR)*, 1(2), 167-183. <https://doi.org/10.30595/raar.v1i2.11971>